



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL AZIS
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 632863

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.400.000
1. MOTOR, HONDA NF 1251R Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
8.400.000		
2. MOTOR, YAMAHA 5D9VEGARR Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.128.798
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	21.528.798
III. HUTANG	Rp.	104.156.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-82.628.002

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABD SYUKUR JUNAIDI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **637280**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m²/188 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.779.750

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 127.301.378

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 468.581.128

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 468.581.128

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FATURAHMAN SAFII**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **632857**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **850.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m²/232 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 424 m²/424 m² di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **21.000.000**

1. MOTOR, HONDA SPM.SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **5.483.013****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **876.483.013****III. HUTANG** Rp. **131.472.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **745.011.013**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH. SAFI'IL ANAM
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637274

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	435.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m ² /217 m ² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	451.250.000
III. HUTANG	Rp.	123.957.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	327.292.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FINA LUTFIANA RAHMAWATI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632836

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 894 m²/894 m² di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1589 m²/1589 m² di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 131.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU F700RGTXMT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3CAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 24.112.930**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.155.112.930**III. HUTANG** Rp. 84.652.800**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.070.460.130

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.